

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Chaidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung. Eresco.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. PT Refika Aditama
- Fajar, Mukti N.D., Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hutomo, Sigit. 2009. *Pajak Penghasilan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Jusran, Heriyanto. 2009. *Hukum Perjanjian Innominaat Dalam Praktek*. Jakarta. Citra Media Ilmu.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta. Ind-Hill.co.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta. Andi Offset.

S., Salim H. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*.

Jakarta. Sinar Grafika.

-----, 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*.

Jakarta. Sinar Grafika.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar*

*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat. 1991. *Azaz-Azaz Hukum Perpajakan*. Bandung. Bina Cipta.

-----, 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermassa.

-----, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta.

Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

PMK Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) (“Kepmen 34/1980”)

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Ketentuan Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 04/PJ.33/1996 tentang  
Pembayaran PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau  
Bangunan

#### **Artikel dan Hasil Penelitian:**

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Kontribusi  
Strategis Membangun Bangsa Melalui Amnesti Pajak: Laporan Tahunan  
2016”. *Laporan Berkala*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia, Jakarta. 2016.

Washington. “Kajian Aspek Legal Pengenaan PPh Final Pengalihan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan dan BPHTB Terhadap Transaksi *Leasing* Tanah dan  
Bangunan”. *Tesis*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Medan.  
2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Kompilasi Bidang Hukum Tentang *Leasing*”.  
*Artikel*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. 2011.

#### **Internet:**

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
*Dampak Perkembangan Sektor Properti terhadap Perekonomian Daerah:  
Optimalisasi Penerimaan Pemerintah Daerah dari Sektor Properti*, diakses  
dari <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160927112320261370982> pada tanggal 19 Desember 2017  
pukul 23.19 WIB.

Agustina Meliani, *Alasan Pemerintah Pangkas Pajak Penghasilan Transaksi Properti*, diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2576339/alasan-pemerintah-pangkas-pajak-penghasilan-transaksi-properti> pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB.